

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat cepat, menciptakan peluang besar untuk pemanfaatan yang lebih luas dan memudahkan akses, pengelolaan, serta penggunaan informasi secara tepat dan akurat. Dalam konteks ini, sistem jaringan komunikasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi penting dalam menghadapi globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi, khususnya bagi pemerintah (Windiasih, 2019). Pemerintah diharapkan dapat beradaptasi dengan memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan TIK melalui *electronic government* (e-government) sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, memberikan layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Windiasih, 2019).

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti *Wide Area Network*, Internet dan *mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (World Bank, 2002). Dasar hukum dari pelaksanaan e-government di Indonesia salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meski begitu, penerapan e-government dalam pemerintahan masih sering dianggap kurang efektif karena berbagai kendala teknis. Beberapa di antaranya termasuk pengembangan aplikasi e-government yang belum optimal, adanya duplikasi aplikasi dengan fungsi serupa yang menyebabkan data ganda serta validasi yang tidak akurat, yang pada akhirnya berdampak pada pemborosan waktu dan biaya (Adolph, 2016).

Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 27.400 aplikasi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang di dalamnya saling tumpah tindih dan dapat menyulitkan masyarakat, terlebih jika harus membuat satu persatu akun pada aplikasi tersebut (Kurniati, 2023). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang mengadopsi interoperabilitas sistem guna memungkinkan pertukaran data antar sektor pemerintahan, yang dikenal sebagai e-government interoperability. Interoperabilitas e-government menjadi elemen penting dalam sistem pemerintahan elektronik di Indonesia. Keberadaannya sangat diperlukan agar berbagai layanan pemerintah yang saling terhubung dalam satu jaringan dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Komunikasi yang lancar ini membawa banyak manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, seperti meningkatkan efisiensi kinerja aparatur dan layanan pemerintahan, memperkuat transparansi, mendukung pemerintah dalam pengambilan kebijakan, serta mempermudah akses informasi bagi semua (Adolph, 2016). Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia pasal 1 Ayat (3) mendefinisikan interoperabilitas data sebagai sebuah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan SPBE. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 23 menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan sistem elektronik sebelumnya dan/ atau sistem elektronik yang terkait.

Maka, interoperabilitas e-government menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam perekonomian

nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMKM berkontribusi sekitar 60,51% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja (Junaidi, 2023). Hal ini menunjukkan peran strategis UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendukung UMKM melalui berbagai kebijakan dan program, salah satunya adalah e-government melalui aplikasi Jogja *Smart Service* (JSS). JSS adalah platform layanan publik digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah Kota Yogyakarta untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Aplikasi ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta, tetapi juga bagi masyarakat luar wilayah Kota Yogyakarta yang ingin mengetahui perkembangan layanan publik di wilayah ini (Gumilar, 2019). Dalam JSS, terdapat layanan khusus transaksi jamuan rapat yaitu Layanan Nglarisi yang ditujukan untuk mendukung UMKM di Kota Yogyakarta. Saat ini, layanan ini dikelola oleh Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta.

Menurut informasi dari Bapak Novi selaku admin operasional Layanan Nglarisi menjelaskan bahwa layanan ini dapat dimanfaatkan bagi UMKM yang tergabung dalam kelompok nglarisi untuk menyediakan konsumsi rapat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta. Para OPD diwajibkan memesan makanan dan minuman langsung dari Layanan Nglarisi untuk kegiatan seperti rapat, pelatihan, sosialisasi, event dan sejenisnya. Namun, layanan ini hanya dapat diakses oleh UMKM yang tergabung dalam kelompok Nglarisi dan OPD di lingkup Kota Yogyakarta sehingga tidak tersedia untuk masyarakat umum. Selain itu, penjualan dalam Layanan Nglarisi juga belum merata karena tidak semua UMKM memahami cara promosi baik secara online maupun offline, maka OPD setempat juga jarang melirik UMKM yang tidak aktif menawarkan produknya.

Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS merupakan bentuk implementasi e-government berbasis interoperabilitas yang mendukung UMKM. Dalam e-government, interoperabilitas berarti kemampuan sistem berbeda untuk bekerja sama dan terintegrasi sehingga memperlancar pelayanan publik dan mengurangi birokrasi yang berlebihan (Imran, 2020). Melalui interoperabilitas Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS, diharapkan dapat mendukung UMKM lokal dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Layanan ini juga memastikan transparansi dan standarisasi dalam proses pemesanan. Namun di Indonesia, keamanan siber dalam interoperabilitas e-government masih menjadi tantangan, sehingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu meningkatkan perlindungan terhadap aplikasi e-government. Selain itu, kesenjangan digital yang tinggi juga dapat menghambat implementasi interoperabilitas e-government, terutama karena masih ada kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan, seperti pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan pengadaan akses internet (Amrynudin, 2024).

Adanya tantangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait interoperabilitas Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS untuk mendukung perkembangan UMKM di Kota Yogyakarta. Di era digital seperti sekarang, UMKM membutuhkan dukungan yang lengkap, mulai dari regulasi dan kebijakan yang tepat, infrastruktur teknologi yang memadai serta pemberdayaan pelaku UMKM agar mampu bersaing. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan manfaat interoperabilitas Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS bagi UMKM, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata serta berkelanjutan. Koordinasi dan integrasi antar sistem menjadi kunci agar layanan ini dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak luas bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau dan mengembangkan layanan ini agar manfaatnya maksimal.

Dengan begitu, perlu dilakukan penelitian terhadap interoperabilitas e-government yang fokusnya adalah Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS dan tantangan yang ada dalam pengembangan UMKM Kota Yogyakarta menggunakan lima (5) indikator teori keberhasilan interoperabilitas menurut Hernikawati, D. Sensuse, D. I. (2016) yang terdiri dari, kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana interoperabilitas e-government dalam Layanan Nglarisi pada aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)* yang mendukung pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam interoperabilitas Layanan Nglarisi dalam aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis interoperabilitas e-government dalam Layanan Nglarisi pada aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*.
2. Mengidentifikasi tantangan dalam interoperabilitas Layanan Nglarisi dalam aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai interoperabilitas e-government, khususnya dalam konteks dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM melalui integrasi layanan digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta untuk meningkatkan efektivitas Layanan Nglarisi, sehingga dapat memberikan

manfaat yang lebih luas bagi UMKM dan memperkuat perekonomian lokal.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar pokok permasalahan dan gambaran penelitian secara keseluruhan. Adapun hal-hal yang dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, definisi konseptual, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir sesuai dengan tema yang akan diteliti yaitu interoperabilitas e-government dalam pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta dengan fokus Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan interoperabilitas e-government dalam pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta yang fokusnya pada Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS dan tantangan dalam interoperabilitas e-government pada Layanan Nglarisi dalam aplikasi JSS.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan.